

Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Erliza Millenia Putri^{a*}, Dewi Zaini Putri^a

^aJurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

***Korespondensi:** dewisulfiana@gmail.com

Info Artikel

Diterima:

5 September 2021

Disetujui:

3 Oktober 2021

Terbit daring:

4 November 2021

DOI: -

Sitasi:

Putri, E.M. & Putri, D.Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Pengeluaran pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2), 106-114.

Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of the minimum wage, open unemployment rate, education and government spending on poverty in Indonesia. This research is a kind of descriptive and inductive research. The data used is secondary panel data from 2010-2019 obtained from related institutions and then analyzed using a panel data regression model by performing a classical assumption test. The results of this study indicate that: (1) the minimum wage has a positive and insignificant effect on poverty, (2) the open unemployment rate has a positive and insignificant effect on poverty, (3) education has a negative and significant effect on poverty, and (4) government spending has a negative effect and not significant on poverty in Indonesia.

Keywords: Minimum Wage, Open Unemployment Rate, Education, and Poverty.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini sejenis penelitian deskriptif dan induktif. Data yang digunakan merupakan data sekunder panel dari tahun 2010-2019 yang diperoleh dari lembaga terkait dan kemudian dianalisis menggunakan model regresi data panel dengan melakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, (2) tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, (3) pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan (4) pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci : Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan, dan Kemiskinan

Kode Klasifikasi JEL: O15; P25; R23

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah hasil upaya berkelanjutan masyarakat di bidang ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam, pendidikan dan industri yang mengarah pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan biasanya dilakukan melalui proses pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu tujuan pembangunan adalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi perhatian pemerintah setiap negara terutama di negara berkembang khususnya Indonesia. Kemiskinan yang terjadi di suatu negara dipandang sebagai masalah serius karena kemiskinan yang ada saat ini belum sepenuhnya teratasi (Ningrum, 2017).

Di sisi lain, pemerintah Indonesia sendiri telah mengubah kebijakan pengentasan kemiskinan dari pendekatan makro *top down* menjadi pendekatan partisipatif komunitas atau rumah tangga. Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah berinovasi dan melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan kronis seperti subsidi pendidikan, beasiswa, transfer tunai bersyarat, program pemberdayaan masyarakat, kredit untuk usaha

kecil menengah dan proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga menyediakan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dari beberapa guncangan eksternal melalui penyaluran beras bersubsidi, bantuan tunai dan asuransi kesehatan yang ditargetkan untuk masyarakat miskin. Namun, sebagian besar penelitian kemiskinan di Indonesia berfokus pada kemiskinan statis, yang menganalisis proporsi penduduk di bawah ambang pendapatan tertentu pada waktu tertentu (Dartanto & Nurkholis, 2013).

Meskipun kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan tetapi apabila dibandingkan dengan negara lain justru penurunan kemiskinan di Indonesia lebih lambat atau penurunannya lebih kecil dari tahun ke tahun sehingga perlu dilakukan penelitian ini bagaimana faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhinya sehingga bisa dijadikan oleh pemerintah sebagai bahan rujukan yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain/negara tetangga seperti negara Laos, kemiskinan di Laos memiliki tingkat kemiskinan ekstrim tertinggi dan penurunan kemiskinannya cepat daripada Indonesia. Walaupun trend Indonesia mengalami penurunan, namun jumlah terbesar orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim berada di Indonesia. Meskipun jumlah penduduk miskin di Indonesia turun, tetapi kenyataannya Indonesia lebih miskin dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Indonesia berasal dari kenaikan rata-rata upah riil harian, indeks nilai tukar petani yang selalu di atas 100, penurunan tingkat pengangguran terbuka, inflasi umum yang rendah, dan penurunan harga eceran beberapa komoditas juga menjadi salah satu faktor pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Oleh karena itu, jumlah penduduk miskin perlu dikurangi, terutama dengan tujuan menaikkan upah minimum. Meski jumlah penduduk miskin mengalami penurunan setiap tahunnya, namun pemerintah perlu mengambil tindakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena berbagai sebab dapat dikatakan sebagai kemiskinan, salah satunya adalah upah minimum (Ayu, 2018). Peningkatan upah minimum pekerja akan meningkatkan daya beli mereka, yang pada akhirnya akan merangsang semangat kerja dan meningkatkan efisiensi kerja. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia, pengangguran semakin meningkat setiap tahunnya sedangkan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja. Sehingga selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Hal ini karena para penganggur tidak memiliki pendapatan dan pengaruhnya pasti buruk. Sehingga hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Oleh karena itu, dikatakan tingkat pengangguran rendah karena lebih banyak kesempatan kerja, sehingga tingkat kemiskinan rendah (Yacoub, 2012). Jika peningkatan tenaga kerja baru terus menunjukkan interval yang lebar. Kondisi ini semakin memburuk pasca krisis ekonomi. Pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah menerapkan kebijakan wajib belajar 9 tahun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan menjadikan masyarakat Indonesia sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, untuk mengentaskan kemiskinan, banyak orang mengenyam pendidikan untuk mengubah jenjang kehidupannya (Dio Syahrullah, 2014).

Terlihat bahwa dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, investasi di bidang pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka semakin meningkat pula ilmu dan keahliannya, yang akan mendorong peningkatan efisiensi kinerja. Dalam rangka meningkatkan produktivitas,

pendidikan dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketertinggalan di suatu daerah. Permasalahan pendidikan terhadap kemiskinan yang cukup serius tidak dapat dipisahkan. Terdapat banyak pemicu kemiskinan yang bermacam – macam dan saling berhubungan serta kita tidak dapat mengurangi kemiskinan itu secara langsung. Secara umum, kemiskinan membuat kita berpikir tentang kegagalan pendidikan, yang berarti bahwa anak – anak yang lahir dalam kemiskinan mereka tidak bisa lepas dari lingkaran kemiskinan itu sendiri.

Penanggulangan kemiskinan juga tidak terlepas dari besarnya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun terus berfluktuasi yang menunjukkan bahwa peran pemerintah semakin meningkat di bidang ekonomi. Pengeluaran tidak hanya untuk pekerjaan pemerintah sehari – hari tetapi juga menyediakan dana untuk kegiatan ekonomi. Apabila pemerintah sudah menetapkan sesuatu kebijakan pembelian barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah tidak hanya melaksanakan pengeluaran, namun juga menghasilkan penerimaan. Jaminan sosial dapat memberikan dukungan terhadap kemiskinan, terutama mereka yang termasuk dalam kategori sangat miskin. Proyek pemerintah diperlukan untuk membantu masyarakat miskin keluar dari lingkaran setan kemiskinan dan mencegah kerentanan sosial serta ekonomi untuk menghindari jatuh di bawah garis kemiskinan.

TINJAUAN LITERATUR

Kemiskinan merupakan masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait yaitu pengangguran, pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan, konsumsi, letak geografis dan lingkungan (Sudirman & Andriani, 2017). Tingginya angka pengangguran tidak terlepas dari rendahnya kesempatan kerja yang diberikan oleh masyarakat. Kesejahteraan merupakan salah satu metode yang diungkapkan oleh Amartya Sen yang meyakini bahwa kesejahteraan berasal dari kemampuan menjalankan fungsi dalam masyarakat (Haughton, 2012). Upah minimum bertujuan untuk meningkatkan status masyarakat rendah, terutama pekerja miskin. Tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga tunjangan juga akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan peran pekerja atau buruh dalam mengentaskan kemiskinan. Indikator kemiskinan lainnya adalah tingkat pengangguran. Semakin tinggi angka pengangguran, semakin rendah kapasitas produktif penduduk, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akan memperburuk angka kemiskinan. Jika mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya atau tidak memiliki penghasilan, mereka dapat dikatakan miskin. Kemiskinan membuat jutaan anak tidak dapat menikmati pendidikan yang berkualitas tinggi, kurangnya dana untuk pendidikan, kurangnya tabungan dan investasi, kurangnya akses ke layanan publik, dan kurangnya akses ke pendidikan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan keluarga, meningkatnya urbanisasi dan bahkan kemiskinan yang lebih parah telah menghalangi ribuan orang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang mereka yang terbatas. Kemiskinan membatasi hak orang atas pekerjaan yang layak (Sahdan, 2005). Masalah kemiskinan membutuhkan campur tangan pemerintah. Manifestasi khusus dari campur tangan pemerintah adalah bagian dari pengeluaran pemerintah. Pengeluaran publik yang dijelaskan dalam APBN pada umumnya harus digunakan untuk layanan publik sebanyak mungkin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Amalia, R., 2015).

Upah merupakan salah satu sumber pendapatan, jika sumber pendapatan berkurang atau tetap sama, maka kesejahteraan juga akan berkurang atau dipertahankan yang tentunya akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan (Ningrum, 2017). Majikan mengakui upah dalam bentuk kompensasi kepada penerima pekerjaan, semakin rendah persyaratan tenaga kerja

pekerja. Peningkatan bertepatan dengan penurunan jumlah pekerja yang dibutuhkan, yang mengarah pada peningkatan jumlah pengangguran. Upah minimum adalah standar minimum bagi pengusaha atau pelaku industri untuk membayar pekerja di lingkungan usaha atau lingkungan kerja.

Kemiskinan adalah kondisi di mana pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dan tidak dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Dengan menggunakan variabel upah minimum, ditetapkan bahwa upah minimum masing-masing provinsi berbeda (Suryawati, 2005). Dalam (Sotomayor, 2021) seiring waktu, efek ini berangsur – angsur menghilang, terutama untuk langkah – langkah distribusi yang sensitif ke bawah. Proses ini bertepatan dengan bertambahnya pengangguran di antara keluarga – keluarga miskin. Perkiraan upah minimum secara akurat berdasarkan pendapatan, kemiskinan atau ketidaksetaraan.

Pengangguran juga dikenal sebagai tunakarya, mengacu pada istilah untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan nyata. Selain itu, meskipun banyak kesempatan kerja, informasinya terbatas dan keterampilan dasar yang dibutuhkan berbeda dari yang dibutuhkan (Iskandar Putong, 2013). Menurut teori, tingkat jumlah pengangguran dapat dihitung dengan perbandingan jumlah orang yang menganggur dengan angkatan kerja. Penurunan pendapatan menyebabkan para penganggur mengurangi pengeluaran konsumsinya, yang mengurangi penurunan kesejahteraan (Remus Silalahi, 2013). Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin menurun hasil pembangunan. Pengangguran merupakan tolak ukur dalam perekonomian, sehingga mempengaruhi distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial. Hal ini diikuti dengan penurunan pendapatan per kapita. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berujung pada penurunan permintaan produk jasa (Whisnu Adhi S, 2011).

Tingkat pendidikan adalah tingkat pendidikan berkelanjutan yang ditentukan menurut tingkat perkembangan siswa, kompleksitas bahan ajar dan cara penyajiannya. Jenjang pendidikan formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dibagi menjadi tiga jenjang, mulai dari tingkat dasar, menengah ke atas (Kuswantoro, 2016). Asumsi dasar teori human capital adalah seseorang dapat meningkatkan penghasilannya dengan meningkatkan tingkat pendidikannya. Berdasarkan teori ini dapat dijelaskan bahwa setiap penambahan tahun ajaran sekolah berarti peningkatan produktivitas dan tingkat pendapatan, sedangkan pendapatan dari sekolah mengalami keterlambatan selama satu tahun, dan pendapatan meningkat karena meningkatnya pendidikan seseorang (Mankiw, 2006). Pendukung teori Human Capital (Adam Smith) mengutip Randy R.W dan Rianti Nugroho yang mengatakan bahwa orang dengan tingkat pendidikan tinggi yang diukur dengan lama sekolah akan memiliki pekerjaan dan gajinya juga lebih tinggi dibandingkan dengan daripada mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Secara umum, kemiskinan menahan seseorang untuk mengenyam pendidikan tinggi. Investasi di bidang pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Masalah kemiskinan ini sangat kompleks dan beragam. Pada dasarnya menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Masyarakat yang tergolong miskin mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga mereka harus mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Namun, hanya mereka yang berpenghasilan tinggi yang mampu membiayai pendidikan tinggi. Pada saat yang sama, masyarakat yang tergolong miskin tidak memiliki cukup dana untuk membiayai pendidikan tinggi, seperti perguruan tinggi. Peningkatan pendidikan penduduk akan meningkatkan produktivitas mereka. Semakin tinggi produktivitasnya maka semakin tinggi pula dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Semakin banyak kebutuhan hidup terpenuhi, maka semakin sedikit kemiskinan (Musa Al Jundi, 2014).

Pendidikan yang dianggap sebagai investasi negara ke depan harus dimiliki oleh semua sektor tanah air.

Pengeluaran pemerintah yang sebenarnya dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur skala kegiatan pemerintah yang didanai pemerintah. Semakin banyak aktivitas pemerintah, semakin tinggi pengeluaran publik. Pengeluaran publik pada dasarnya “dapat dikonsumsi”. Artinya, pembelian barang dan jasa ekonomis yang dapat dikonsumsi langsung atau diproduksi untuk barang lain (Sangkaen, Deny, 2018). Perlindungan sosial merupakan bagian penting dari pengentasan kemiskinan. Perlindungan sosial bertujuan untuk memuaskan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Program perlindungan sosial Indonesia merupakan jaminan penting bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, semua warga negara memenuhi kebutuhan hidup dasar dan memberikan penghidupan dasar dan pelayanan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Pengeluaran publik untuk jaminan sosial meliputi: (1) Besarnya dana jaminan kesehatan APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Jaminan Sosial (PBI). (2) Besarnya dana anggaran pemerintah yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra/Raskin (BPS, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia tahun 2010-2019 dan dianalisis dengan menggunakan regresi panel. Adapun model persamaan analisis data panel dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Log}Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 \text{Log}X_{4it} + e_{it} \quad (1)$$

Di mana $\text{Log}Y$ adalah kemiskinan dalam ribu jiwa, $\text{Log}X_1$ adalah upah minimum dalam rupiah, X_2 adalah tingkat pengangguran terbuka dalam persen, X_3 adalah pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah dalam tahun, $\text{Log}X_4$ adalah pengeluaran pemerintah fungsi perlindungan sosial dalam rupiah, β_0 adalah konstanta, $\beta_{1,2,3,4}$ adalah Elastisitas Variabel Bebas, i adalah *Cross section*, t adalah *time series*, e_{it} adalah *Error term*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris dari pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Indonesia. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Eviews 9 dan uji asumsi klasik normalitas untuk SPSS 19. Setelah melakukan uji regresi panel dalam penelitian ini, maka model yang terpilih adalah model *Fixed Effect Model*. Berdasarkan tabel hasil pengolahan data sekunder menggunakan Eviews 9, maka diperoleh persamaan regresi panel sebagai berikut:

$$\text{Log}Y_{it} = 13,530 + 0,043 \text{Log}(X_1) + 0,006(X_2) - 0,134(X_3) - 0,004 \text{Log}(X_4) \quad (2)$$

Tabel 1. Hasil Estimasi Persamaan Regresi Panel

Variabel	Coefficient	Signifikansi
C	13,53005 (0,255332*)	Signifikan
LogX ₁	0,043118 (0,028534)	Tidak Signifikan
X ₂	0,006205 (0,004163)	Tidak signifikan

X ₃	-0,134163 (0,030737*)	Signifikan
LogX ₄	-0,004198 (0,008027)	Tidak signifikan

Sumber : Hasil Olahan Data, Eview 9(2021)

Berdasarkan persamaan 2 menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum (X₁) berpengaruh positif terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 0,043. Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan upah minimum sebesar 1 rupiah, maka kemiskinan akan meningkat sebesar 0,043 jiwa, dengan asumsi *ceteris paribus*. Tingkat Pengangguran Terbuka (X₂) berdasarkan model memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 0,006. Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 persen, maka kemiskinan akan meningkat sebesar 0,006 jiwa, dengan asumsi *ceteris paribus*. Pendidikan (X₃) berdasarkan hasil estimasi model memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi sebesar 0,134. Hal ini bermakna bahwa peningkatan pendidikan sebesar 1 persen akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,134 jiwa, dengan asumsi *ceteris paribus*. Kemudian Pengeluaran Pemerintah (X₄) berdasarkan model memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi sebesar 0,004. Hal ini bermakna bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1 rupiah maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,004 jiwa, dengan asumsi *ceteris paribus*.

Berdasarkan estimasi dari analisis data panel, variabel upah minimum berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia, namun tidak signifikan. Hal ini diamati dengan nilai probabilitas di atas tingkat signifikansi 0.05 dan memiliki koefisien regresi 0.0431. Dapat diartikan bahwa untuk setiap 1% kenaikan upah minimum akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.0431 dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini berarti peningkatan upah minimum belum tentu dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia, hal ini disebabkan pemberian upah minimum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat dikatakan masih belum benar-benar menyejahterakan masyarakat. Jika dikaitkan dengan biaya sosial dari inflasi, maka kenaikan upah minimum seolah-olah tidak berguna ketika inflasi terus meningkat, sehingga dapat dikatakan bahwa ketika biaya hidup terus meningkat akibat inflasi, maka upah minimum meningkat seiring dengan jumlah penduduk miskin yang terus meningkat.

Menurut Olivier Blanchard (2017) sektor informal masih belum bisa menyejahterakan rakyat Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir inflasi lebih tinggi daripada pertumbuhan upah. Hal ini disebabkan oleh ketika terjadi kenaikan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah sehingga menimbulkan biaya sosial dari biaya inflasi tersebut. Sedangkan, pendapatan masyarakat dari pertumbuhan upah yang diterima oleh masyarakat lebih rendah dibandingkan satuan kenaikan harga/inflasi. Akan tetapi, pada penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh Hapsari (2018) menunjukkan hasil yang berbeda di mana semakin tinggi upah minimum maka semakin kecil jumlah penduduk miskin. Hal ini mengemukakan bahwa hasilnya menunjukkan upah minimum mempunyai pengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa upah minimum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan teori di mana upah minimum justru berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut pada dasarnya bisa dijelaskan oleh adanya biaya sosial dari inflasi di mana ketika kenaikan inflasi lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan upah minimum.

Berdasarkan hasil analisis data dan perkiraan yang dibuat dalam penelitian ini, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 0.0062, namun tidak signifikan. Dapat diartikan bahwa, dengan

asumsi *ceteris paribus* untuk setiap kenaikan 1% tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan meningkat 0.0062. Hal ini berarti peningkatan pengangguran belum tentu dapat meningkatkan kemiskinan, sebagaimana yang disebutkan oleh Aludori di dalam Supripto (2020) bahwa pada dasarnya pengangguran berkolerasi positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan karena pada era globalisasi setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama atau setara dalam memperoleh ataupun mengayom pendidikan.

Suripto (2020) pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, karena pengangguran terutama pengangguran terbuka yang menganggur tetapi masih mampu memenuhi kebutuhannya, karena tidak semua penganggur selalu miskin, karena sebagian kelompok penganggur terbuka berada di sektor informal, dan sebagian masyarakat sendiri ada juga pekerjaan dengan kurang dari 35 jam per minggu. Goldfrey dalam Suripto (2020) menyatakan bahwa kemiskinan tidak selalu terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Pandangan Lincolin Arsyad dalam Suripto (2020) juga memperkuat pandangan ini, yaitu keliru jika menganggap yang tidak bekerja itu miskin dan yang bekerja penuh itu kaya. Ini karena pekerja perkotaan mungkin tidak bekerja secara sukarela karena mereka mencari pekerjaan yang lebih baik yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka, dan ada sumber daya lain untuk membantu memecahkan masalah ekonomi, yaitu menolak pekerjaan yang mereka anggap lebih rendah.

Menurut perkiraan dari analisis data panel, variabel pendidikan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dan diamati dengan nilai probabilitas kurang dari 0.05 tingkat signifikansi. Pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia., dengan koefisien regresi sebesar -0.1341. Hal ini dapat diartikan sebagai penerimaan *ceteris paribus* akan mengurangi kemiskinan sebesar 0.1341 untuk setiap 1% peningkatan pendidikan. Artinya, ketika pendidikan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dikarenakan setelah mengenyam pendidikan tinggi, masyarakat cenderung memiliki keterampilan yang semakin banyak dan dapat bersaing di dunia kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin sedikit kemiskinan. Karena tingkat pendidikan yang tinggi akan menghasilkan produktivitas yang tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh I Komang Agus (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah. Untuk mengurangi kemiskinan, penduduk setempat harus mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga membutuhkan infrastruktur yang baik untuk sampai ke sekolah dengan cepat. Karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pergi ke sekolah yang terdekat dengan rumah, banyak anak usia sekolah yang masih putus sekolah di pegunungan dan desa. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat infrastruktur lebih seimbang, terutama di daerah pedesaan yang masih sangat tertinggal.

Menurut Kuznet (dalam Todaro, 2006), pendidikan merupakan jalan keluar dari kemiskinan di banyak negara, dimana mereka digambarkan sebagai orang miskin yang mengharapkan pekerjaan baik dan pendapatan yang tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan kemiskinan, karena dengan pendidikan yang lebih tinggi jumlah penduduk miskin dapat dikurangi sehingga masyarakat dapat memiliki keterampilan yang lebih banyak dan dapat bersaing dalam dunia kerja.

Berdasarkan perkiraan dari analisis data panel, variabel belanja publik memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan Indonesia dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini diamati dengan nilai probabilitas di atas tingkat signifikansi 0.05 dan

memiliki koefisien regresi -0.0041 . Hal ini dapat diartikan bahwa untuk setiap kenaikan 1 rupiah dalam pengeluaran pemerintah, kemiskinan berkurang 0.0041 , dengan memperhitungkan *ceteris paribus*. Artinya, ada korelasi negatif antara pengeluaran publik terhadap kemiskinan. Dengan kata lain, belanja publik Indonesia akan meningkat atau menurun dalam jangka panjang, dampak ini akan menjadi salah satu faktor pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tidak signifikannya pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan disebabkan oleh pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial, seperti program bantuan tunai, program keluarga harapan, subsidi dan proyek-proyek lain yang kurang tepat sasaran. Penempatan yang tidak tepat menyebabkan kesalahan penentuan siapa yang dimasukkan (inclusion) dan siapa yang tidak (exclusion) sehingga pengeluaran pemerintah tidak dapat membantu masyarakat secara efektif terhadap orang miskin yang membutuhkan.

Karena kebanyakan program perlindungan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk uang tunai yang hanya untuk memenuhi biaya konsumsi masyarakat miskin. Bahwa program-program pengeluaran pemerintah dalam bentuk perlindungan sosial lebih banyak diutamakan pada program-program untuk konsumsi sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Siti Walida (2015) yang menyatakan bahwa belanja publik berdampak negatif terhadap kemiskinan, karena peningkatan belanja publik mempengaruhi pengurangan kemiskinan di Indonesia setiap tahunnya. Hal ini merupakan dampak positif dari peningkatan belanja investasi pemerintah, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai, dan mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran publik untuk perlindungan sosial memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Jika pengeluaran publik meningkat tetapi tidak signifikan, dikarenakan alasan tidak signifikannya dapat dilihat dari beberapa kajian literatur yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial ditujukan untuk pemenuhan konsumsi masyarakat bukan untuk hal-hal produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat atau upaya dalam membuat masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan untuk hidup mandiri.

Berdasarkan hasil estimasi analisis data panel, bahwa variabel upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama signifikan mempengaruhi kemiskinan. Di mana pemerolehan probabilitas F-statistik lebih kecil dari nilai taraf nyata $0,05$. Sementara itu, nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh adalah sebesar $0,9966$ yang mana sebesar $99,66$ persen variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen. Sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model dan tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Oleh karena itu, perubahan upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan pengeluaran pemerintah menentukan kemiskinan di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi metode data panel menggunakan *Fixed Effect Model* dan pembahasan terhadap hasil estimasi penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Hasil pengujian menjelaskan bahwa variabel upah minimum dalam penelitian ini berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, (2) Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, (3) Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang dikukur dari rata – rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif dan

signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, (4) Pengeluaran pemerintah dengan menggunakan sektor perlindungan sosial berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, (5) Upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial secara bersama – sama signifikan mempengaruhi kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, R., madris & A. R. R. (2015). Pengaruh pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Analisis*, Vol. 4, No, Hal 183 – 189.
- Ayu, D. S. (2018). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur (Tahun 2010-2015)*.
- BPS. (2021). *Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah (Persen)*. Wwww.Bps.Go.Id. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1759/sdgs_1/1
- Dartanto, T., & Nurkholis. (2013). The determinants of poverty dynamics in Indonesia: evidence from panel data. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(1), 61–84. <https://doi.org/10.1080/00074918.2013.772939>
- Dio Syahrullah. (2014). “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2009-2012.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Gujarati, D. N. (2010). *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi Ketiga* (Edisi Keti). Erlangga.
- Houghton, J. dan S. R. K. (2012). *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality)*. Salemba Empat.
- Iskandar Putong. (2013). *Pengantar Mikro dan Makro*. Mitra wacana Media.
- Kuswanto, I. G. P. D. (2016). *Analisis tingkat pendidikan, pdrb dan upah minimum regional terhadap kemiskinan di provinsi banten*. 6(1), 18–35.
- Mankiw, N. G. (2006). *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Edisi keti). Salemba Empat.
- Musa Al Jundi. (2014). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi - Provinsi Di Indonesia*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5364>
- Remus Silalahi, dkk. (2013). *Teori Ekonomi Makro*. Citapustaka Media Perintis.
- Sahdan, G. (2005). *Menanggulangi Kemiskinan Desa (Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan)*.
- Sangkaen, Deny, dkk. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19.
- Sotomayor, O. J. (2021). Can the minimum wage reduce poverty and inequality in the developing world? Evidence from Brazil. *World Development*, 138, 105182. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105182>
- Sudirman, S., & Andriani, L. (2017). Pengaruh Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 148. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.15>
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Proceedings - European Aviation Safety Seminar, EASS*, 08(03), 585–597.
- Whisnu Adhi S. (2011). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Yacoub, Y. (2012). *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. 8, 176–185.